

TANTANGAN TERHADAP EKSISTENSI NEGARA BANGSA INDONESIA DAN PEMAKNAAN KEMBALI NASIONALISME

Oleh

Sugiyarto

Pengajar Jurusan Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Concrete experience in the past has made the term nationalism very important in constructing Indonesian identity, as a unifying factor of diverse communities throughout the archipelago, not merely an academic, theoretical concept. The nation state ideology found its final expression in Pancasila and the 1945 Constitution. But even since the birth of this Republic, ideological conflicts never stop happening. And unfortunately, since the new order regime, the meaning of nationalism keeps on being distorted, manipulated, and then decreases into phenomena of separating actions from many local communities, showing their refusal to continue to be a part of Indonesia nation state. There is a need to reinterpret nationalism through Pancasila values in the current global era.

Keywords: *nationalism, Pancasila, globalization*

A. PENDAHULUAN

Fenomena pembentangan Benang Raja, bendera Republik Maluku Selatan (RMS), pengibaran bendera Gerakan Papua Merdeka (GPM), Bintang Kejora, dan pembentukan partai politik lokal di Aceh yang mirip Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendorong pertanyaan tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai finalisasi konsep kebangsaan. Bagi Indonesia, konsep nasionalisme bukan wawasan

kebangsaan baru sekali pun istilah itu pada akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh para cendekiawan dan negarawan. Berbagai pandangan banyak juga ditemui di media massa, baik pada media cetak maupun elektronik. Jikalau demikian halnya maka apakah yang bisa mendorong nasionalisme menjadi aktual kembali dalam masyarakat Indonesia.

Aktualisasi perbincangan nasionalisme bertepatan waktunya dengan meluasnya pembicaraan globalisasi.

Antara nasionalisme dengan globalisasi memang mempunyai hubungan fungsional yang sangat relevan untuk diperbincangkan. Pada umumnya kita memahami kebangsaan selalu dihubungkan dengan pengelompokan umat manusia menurut bangsa masing-masing, sedangkan istilah globalisasi lebih diarahkan kepada pengertian masyarakat umat manusia tanpa sekat kebangsaan (Hobsbawm, 1992:25-27).

Dalam memahami dan memecahkan abad ke-21 posisi Indonesia berada di tengah-tengah tuntutan perkembangan di dalam dan di luar negeri, maka apa yang dimaksudkan dengan pembaharuan konsep kebangsaan susah untuk dirumuskan secara jelas. Abad ke-21 bukan zamannya generasi '45, tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan bahkan sebagai kehormatan bagi generasi pasca revolusi untuk menemukan makna baru tentang nasionalisme.

B. RELEVANSI NEGARA KEBANGSAAN

Merebaknya masalah nasionalisme dewasa ini sebenarnya lebih tertuju kepada permasalahan relevansi negara kebangsaan. Dalam hubungan ini pendekatan sejarah dapat digunakan untuk dapat melacak bahwa terkristalisasinya aspirasi kebangsaan pada tahap idealisasi perjuangan, terwujud lebih menonjol

dalam bentuk Sumpah Pemuda (SP) 1928. Rumusan tiga pengakuan yang merupakan kesatuan tentang pengertian wilayah (*territory*), bangsa (*sociological majorities*), dan bahasa (*language*) sebagai alat komunikasi yang homogen (Suhartono, 2001:79) pada dasarnya dijadikan tujuan perjuangan bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan. Rumusan ini merupakan hasil dari proses sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa yang melahirkan keyakinan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan gerakan etnik. Keyakinan mereka cukup beralasan sebab kejayaan bangsa Indonesia yang berbentuk kerajaan pada masa sebelumnya mudah dilumpuhkan oleh kolonialisme melalui politik *divide et impera*. Politik yang sama juga digunakan untuk menumpas gerakan kaum nasionalis pada masa pergerakan nasional.

Proses empiris perjuangan para perintis kemerdekaan yang meletakkan prasyarat bahwa Indonesia harus mengikat diri menjadi satu kesatuan yang utuh. Akan tetapi kondisi geografis, kultural dan etnikal menyebabkan pemaknaan wawasan kebangsaan Indonesia dihadapkan pada aspek multikultural. Kesemuanya ini merupakan daya dorong para perintis kemerdekaan berada dalam zaman idealisasi perjuangan dengan menganut paham bahwa bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang

sejarah, nasib, tujuan dan cita-cita yang sama. Rumusan inilah yang dapat menyatukan seluruh suku bangsa Indonesia menjadi satu bangsa, di samping yang secara empiris berhasil menghantar bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Dengan demikian nasionalisme yang di dalamnya mengandung totalitas unsur persatuan dan kesatuan, ke-ika-an dalam kebhinekaan, bagi bangsa Indonesia bukanlah masalah teoritikal atau akademikal semata.

C. PEMAANAAN NASIONALISME DALAM PERGERAKAN NASIONAL

Rumusan dan pengertian nasionalisme di Indonesia tumbuh pada berbagai golongan yang menjadi dasar politik dengan berimajinasi akan terbentuknya sebuah bangsa Indonesia sebagai hasil akhir perjuangan menuju tercapainya Indonesia merdeka. Pada awalnya dirintis melalui pemikiran para pelajar STOVIA ketika mereka berusaha meraih kemajuan bersama lewat semangat persatuan sebagai bentuk organisasi modern, Budi Utomo (perkumpulan perantara), maka dinyatakan bahwa tujuan selanjutnya adalah terbentuknya suatu persaudaraan nasional tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, dan kepercayaan ke dalam satu perkumpulan di Jawa. Dengan strategi itu organisasi akan mampu mewujudkan cita-citanya dan secara spontan menuju

kearah pertumbuhan yang tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi lebih mementingkan berbagai etnik Hindia (Suhartono, 2001:30)

Ketika Sarekat Islam (SI) didirikan dan dalam perkembangannya pada tahun-tahun pertama ternyata Islam dapat dipergunakan sebagai alat pengikat bagi penduduk yang heterogen. Sifat SI yang nasionalis tampak dari ketentuan anggaran dasarnya yang menentukan bahwa orang Islam yang berkebangsaan asing tidak boleh menduduki jabatan-jabatan penting dalam pimpinan partai (Deliar Noer, 1988:102). Kata “nasional” ketika diadakan Kongres Nasional I SI di Bandung (1916) diartikan oleh Tjokroaminoto sebagai cita-cita pergerakan rakyat membentuk persatuan bersama dan bersama seluruh suku bangsa naik menuju sebuah bangsa (Blumberger, 1935:63)

Tujuan untuk memupuk nasionalisme bangsa pada waktu itu tidak hanya mencakup penduduk Bumiputera, tetapi juga golongan keturunan Belanda, Tionghoa dan penduduk Timur Asing lainnya, yang menganggap Hindia sebagai *national home* (Kartodirdjo, 1990: 113). Dibandingkan dengan Budi Utomo dan SI ternyata *Indische Partij* (IP) programnya lebih terperinci dalam merumuskan tujuan dan daftar kegiatannya. IP berimajinasi tentang entuk negara Hindia dengan kaum

Hindia sebagai warganegara baru. Walaupun umurnya pendek, pengaruh pemikiran IP tentang wawasan kebangsaan menjadi landasan perjuangan Perhimpunan Indonesia (PI) yang dikemas ke dalam empat pokok pikirannya, yaitu kesatuan nasional, solidaritas, nonkoperasi, dan swadaya (Suhartono, 2001:61).

Pemikiran dengan rumusan awal dari BU, SI dan IP kemudian diolah oleh PI sehingga setelah diterimanya kata Indonesia menggantikan istilah Hindia Belanda pada akhirnya menjadi pengertian ketatanegaraan sebagai identitas Bangsa Baru. Di kalangan perkumpulan pemuda segera menindaklanjuti perjuangan pemahaman konsep Indonesia sebagai pengertian ketatanegaraan dan Bangsa Baru melalui Kongres Sumpah Pemuda yang menghasilkan nilai-nilai kebebasan, kemandirian, dan kebersamaan.

Selain organisasi dan partai politik, lembaga pendidikan ekstra kolonial juga merupakan tempat penyebaran wawasan kebangsaan. Tujuan institusi ini untuk mendidik murid-murid agar mempunyai rasa tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembalikan harkat dan martabat rakyat. Pendidikan mencoba menghasilkan manusia yang merdeka pikirannya, batinnya dan tenaganya berdasarkan keyakinan kepada hakekat pendidikan yang hendak melepaskan berbagai bentuk dan manifestasi ikatan-

ikatan yang membelenggu dan menurunkan derajat kemanusiaan (Sugandi, 2004:56-57).

D. PEMAKNAAN NASIONALISME SESUDAH REVOLUSI

Ideologi kebangsaan yang tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah dalam kesadaran antarkaum terpelajar Indonesia pada akhirnya dapat menjadi bagian integral dari dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sehingga menjadi sumber hukum yang tertinggi. Sekali pun demikian di dalam perkembangannya, penghayatan terhadap kesadaran berbangsa mengalami pasang-surutnya yang seringkali terkait dengan upaya-upaya mendramatisasi proses sejarah kelahiran Pancasila sebagai ideologi nasional.

Pada awal dasawarsa kedua kelahiran NKRI, tidak jarang muncul konflik-konflik ideologi secara eksplisit dan terbuka di dalam konstituante, baik ideologi yang berusaha mengajukan ideologi alternatif maupun ideologi yang ingin memodifikasi Pancasila. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara formal dapat mengakhiri pertarungan ideologis itu, tetapi friksi-friksi masih terus berlanjut. Antara 1958-1961 bermunculan kekuatan-kekuatan sentrifugal dalam bentuk daerahisme dan regionalisme. Sementara itu, konflik-konflik yang bersumber pada

perbedaan interpretasi ideologi negara masih berkepanjangan yang mencapai puncaknya pada Gerakan 30 September 1965.

Pemerintah Orde Baru yang lahir pada masa *abortive coup* senantiasa mewarisi sejumlah patologi politik yang pada esensinya merefleksikan menurunnya kadar penghayatan terhadap nasionalisme. Dipandang dari kerangka yang lebih luas paket pembangunan politik jangka panjang pemerintahan Orde Baru secara implisit nampak merefleksikan upaya-upaya untuk mengeliminasi kecenderungan sentrifugal dan mengatasi destabilisasi kekuatan yang diletakkan semata-mata untuk menegakkan sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pamudji, 1985: 21-22).

Pancasila yang secara historis berkembang dan terbuka selalu dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan zaman dan persoalan generasi, tetapi esensinya tidak berubah. Di kalangan generasi muda Indonesia sdah terlihat secara perlahan meninggalkan paradigma budaya agraris dan masuk ke dalam galaksi budaya industri dan pasca-industri. Mereka sudah belajar secara terbuka untuk menghayati sila pertama dengan lebh dewasa. Dalam penghayatan yang demikian itu iman dan taqwa diberikan bobot yang lebih tinggi. Di sini kepada kaum muda harus diberikan pemahaman bahwa agama dengan

iman/taqwa/ religiositas mestinya saling berkaitan, tetapi tidak sama esensinya. Untuk itu guna mewujudkan kebenaran penghayatan dan pengamalan sila I perlu dipilah. Sementara itu, kita juga harus lebih arif untuk menyikapi bahwa agama sering menjadi penyebab perpecahan, sedangkan iman dan taqwa bahkan menjadi unsure pemersatu dan perekat persaudaraan.

Pemaknaan terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga akan mengalami proses pendewasaan di kalangan generasi muda, terutama dalam pemahaman, pemghayatan dan pengamalan kuajiban dan hak-hak asasi manusia Indonesia dalam konteks kemanusiaan secara universal. Logikanya tidak ada manusia yang berakal sehat akan mengatakan bahwa situasi dan kondisi budaya dan perkembangan histories dari semua bangsa itu sama persis. Sekalipun demikian tidak jarang dalam pengakuan perbedaan cultural dan histories itu bagi kawula muda Indonesia pasti sudah memahami bahwa pelanggaran hak-hak asasi pribadi antarwarga negara pada akhirnya akan merugikan kepentingan bangsa dan negaranya jua.

Sila ketiga dari Pancasila mendapatkan pemaknaan yang cukup mencolok dalam wawasan kebangsaan, terutama sekali dalam pengertian politik, ekonomi, edeologi, dan sosial. Sekali pun

demikian, kita tetap konsisten pada kebhinekatunggalikaan. Wawasan kebangsaan yang kita pilih bukanlah nasionalisme model Nazi Hitler yang berasas kecongkakan yang eksklusif, atau bangsa Inggris mempunyai pedoman *right or wrong my country*. Bahkan sering kita mendengarkan seruan para pejabat kita bahwa nasionalisme dan patriotisme hanya mempunyai makna jika didasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila, khususnya pada nilai moral dan etika yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian sekarang kita dapat bertanya kepada diri sendiri, sudah sampai dimana kita terutama kaum muda memiliki kerelaan berkorban demi tanah air, meneladani nilai-nilai kejujuran para pendahulu kita.

Generasi muda rupanya sudah jenuh dengan berbagai teori dan pembohongan publik, bahwa demokrasi bukan demokrasi liberal atau komunis, bukan Barat dan tidak mengimpor dari luar negeri, dan seterusnya. Pada dasarnya generasi muda kita mencari hakikat dari konsistensi dan konsekuensi struktur-struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya yang benar-benar pancasilais. Mereka selalu mencari pengamalan arti kebijaksanaan. Dalam hal ini apakah kebijaksanaan dalam pengertian kearifan, bermoral, beretika, ataukah eufemisme

kebijaksanaan yang berarti korupsi, berkonotasi uang semir dan masih banyak lagi bentuk-bentuk tipuan-tipuan. Bahkan masalah perwakilan di lembaga kekuasaan eksekutif dan legislative perlu *fair play* terjamin dan terjaga.

Bagaimanakah memaknai nasionalisme dalam sila kelima. Jika dalam dasawarsa-dasawarsa yang lampau sila ketigalah yang dipandang ujian berat dan kritis, tetapi dewasa ini justru dua sila terakhir yakni sila keempat dan kelima yang masih merupakan tantangan yang berat. Pengertian adil rupanya bukan barang yang sudah jadi dan mapan, tetapi merupakan hasil dari proses cara pikir, citarasa dan rasa dalam menghayati kehidupan. Khususnya menyangkut masalah hak dan kewajiban perseorangan atau hak dan kewajiban kolektif konkret. Dengan demikian secara otomatis sila kelima ini sesuatu yang tumbuh dalam proses historis. Demikian halnya ukuran tentang penafsiran kata seluruh rakyat. Dalam konteks feodal bahwa seluruh rakyat sudah dinyatakan makmur apabila seluruh golongan atasan atau para ksatria sudah sejahtera.

E. PENUTUP

Nasionalisme sebagai bentuk pernyataan pikiran dan ungkapan perasaan yang bermakna ternyata telah mendorong munculnya gagasan-gagasan baru di dalam

masyarakat Indonesia yang sedang mempersoalkan dikotomi fenomena antara yang lama dengan baru, antara tradisionalitas dengan modernitas

Dewasa ini yang perlu dipolakan dalam gagasan dan tindakan adalah wawasan kebangsaan yang terbuka, nasionalisme yang memberikan peluang dan kesempatan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pancasila dalam landasan idealnya. Untuk itu kepercayaan kepada kemampuan sendiri perlu dikembangkan berdasarkan kesungguhan, kejujuran, dan idealisme tinggi.

Bertolak dari iklim keterbukaan akan dapat ditanamkan pola pikir untuk mendiskusikan hal-hal tindakan sewenang-wenangan menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hak-hak rakyat dalam UUD 1945. Keberanian untuk melakukan interpretasi ulang atas dasar-dasar negara dalam praktik politik dan pemikiran kreatif

tanpa prasangka harus dapat iklim demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Blumberger, J. Th. Petrus. 1935. *De Communistische Beweging in Nederlandsch-Indie*. Haarlem: HD Tjeek Willink & Zoon.
- Hobsbawm, E.J. 1992. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lemhannas. 1982. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia
- Noer, Deliar. 1988. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Pamudi, S. 1985. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Suatu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo samapi Proklamasi 1908-1945)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Achmad. 2004. *Teori Pembelajaran*. Semarang: UPT MKK UNNES.

